

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024



KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

Jl. Veteran No. 05 Desa Limbangan Telp. (0294) 571011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Limbangan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Penyusunan Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal berdasarkan pada Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2024 yaitu Kendal Smart City dengan Fokus Pembangunan Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kendal semakin efektif, efisien, pelayanan publik semakin mudah dan handal, serta kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Penetapan Kinerja Tahun 2024 ini mendeskripsikan bagaimana capaian kinerja yang hendak diwujudkan oleh Kecamatan Limbangan pada tahun 2024 sesuai dengan Rencana Strategik yang telah ditetapkan. Melalui instrumen ini diharapkan dapat mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam membangun pemerintahan yang baik dan terpercaya berdasarkan prinsip-prinsip good governance.

Kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Limbangan Tahun 2024 ini masih banyak kelemahan dan kekurangan namun setidaknya dapat menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan sebagai tugas pokok dan fungsi Camat serta dapat menjadi bahan kajian yang bermanfaat bagi upaya peningkatan penyelenggaraan kegiatan yang akan datang.

Demikian dan semoga dokumen ini dapat menjadi bahan masukan serta informasi yang berguna bagi pengambil keputusan (decision maker) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

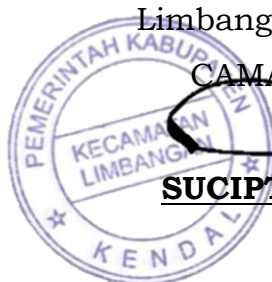
Limbangan, Agustus 2024

CAMAT LIMBANGAN

SUCIPTO, S. STP., M.M

Pembina

NIP. 197807041997031002



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Landasan Hukum		4
1.3 Maksud dan Tujuan		7
1.4 Sistematika Penulisan		8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU		
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra PD		10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD		21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD		25
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD		30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat		34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional		37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD		38
3.3 Program Kegiatan.....		39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		48
BAB V PENUTUP		62
Lampiran - lampiran		

DAFTAR TABEL

Tb.T-C.29	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022 Kec. Limbangan	15
Tb.T-C 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Limbangan Kabupaten Kendal	23
Tb.T-C.31	Review Terhadap RKPD Tahun 2024 Kecamatan Limbangan	32
Tb.T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	34
Tb.T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal	41
Tabel	Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Limbangan	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan di tetapkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Limbangan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal.

1.1.1.1. Pengertian Renja

Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun 2024 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupaten Kendal seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Limbangan Tahun 2021 – 2026

Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Limbangan Tahun 2024 merupakan dokumen yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Limbangan Tahun 2021–2026 dan merupakan salah satu bahan dari SKPD yang akan digunakan untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2024 yang telah disusun dengan mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 .

1.1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari enam tahapan utama yaitu tahap Persiapan Penyusunan, tahap

Penyusunan Rancangan Akhir, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan tahap Penetapan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

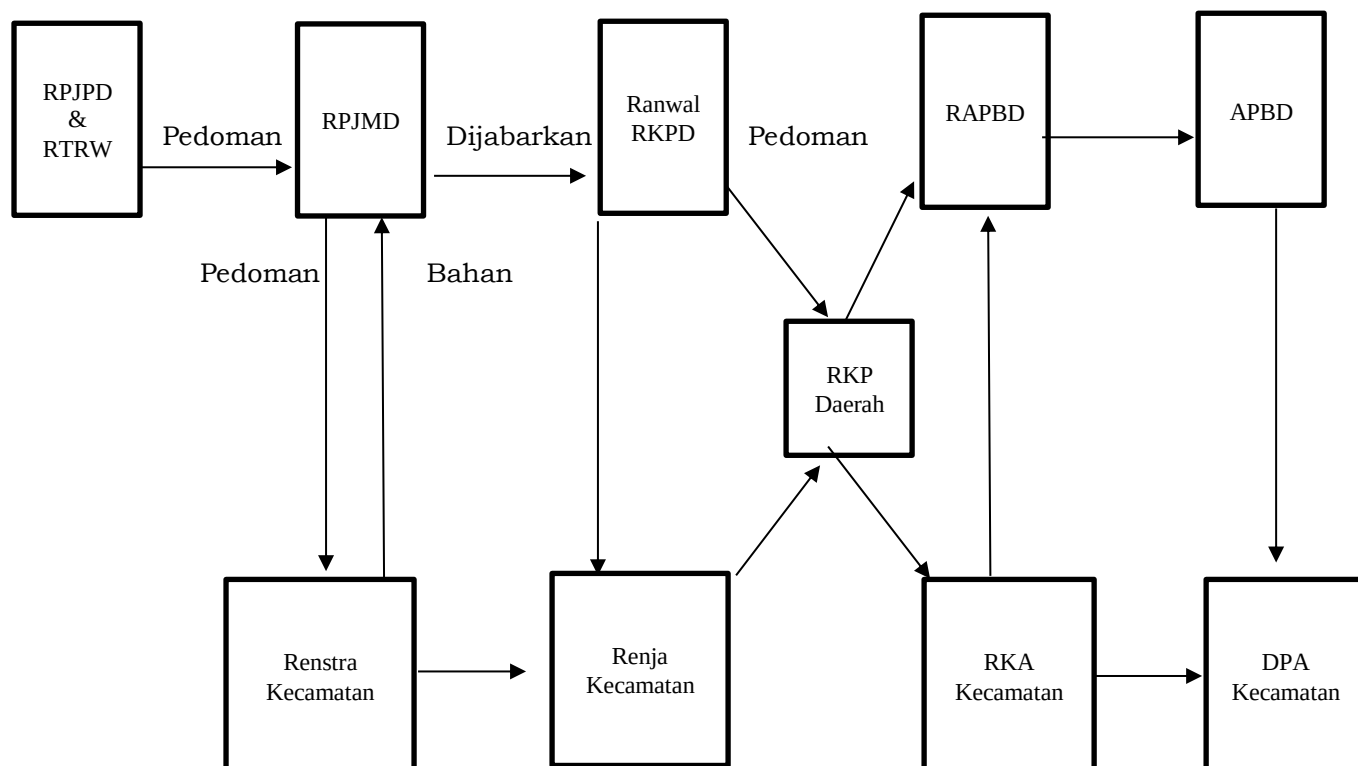
Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Limbangan tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Limbangan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Tahun 2024. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



1.2 Landasan hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun

- 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
 21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 37).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah tersusunnya dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Kecamatan Limbangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 2024.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Limbangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Limbangan dalam menentukan prioritas Program dan Kegiatan Tahun 2024.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Limbangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Limbangan untuk memahami Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Operasional Tahun 2024, dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan

penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja.

4. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Limbangan tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024;
5. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada tahun 2024 kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapinya misi dan visi kepala daerah;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Limbangan Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Berisi mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Bab II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap terhadap Rancangan Akhir RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah,

rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra perangkat daerah serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tahun 2022 Kecamatan Limbangan melaksanakan 5 program dan 10 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan keempat tahun 2022 dapat terealisasi rata-rata 99.7%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/ kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 95 %.

Kegiatan yang telah mencapai 100% adalah 5 kegiatan sedangkan yang tidak mencapai 100% sebanyak 5 kegiatan karena ada rasionalisasi anggaran, sehingga beberapa kegiatan tidak tercapai secara optimal. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan tahun 2022 adalah rata-rata 99,8%

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (Tahun $n-2 = 2022$) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Program sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Jumlah program Tahun 2022 ada 5 program, sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Target dari program tersebut adalah Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Perangkat Daerah sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersebut sebesar Rp

2.713.019.284,00 terealisasi sebesar Rp 2.530.756.580,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 93,28 %.

- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Target dari Program tersebut adalah Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tersebut sebesar Rp 6.712.000,00 terealisasi sebesar Rp 6.712.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Target dari Program tersebut adalah Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD sebesar 100% terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tersebut sebesar Rp 33.343.000,00 terealisasi sebesar Rp 33.343.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Target dari Program tersebut adalah Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani 100% dan terealisasi sebesar 99,9% atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,9%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tersebut sebesar Rp 144.714.000,00 terealisasi sebesar Rp 144.630.544,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,9%.
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Target dari Program tersebut adalah Persentase penyusunan APBDes tepat waktu sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tersebut sebesar Rp

61.650.000,00 terealisasi sebesar Rp. 61.650.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan.

Kegiatan Tahun 2022 jumlahnya ada 10 Kegiatan, sebagai berikut :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100% (target cetak dokumen perencanaan 160) dan terealisasi sebanyak 160 dokumen atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp 18.450.000,00 terealisasi sebesar Rp 18.450.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah selama 14 bulan dan terealisasi sebesar 14 bulan atau tingkat capaian kinerja 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp 2.286.442.784,00 terealisasi sebesar Rp 2.109.402.185,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 92,26%.

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah selama 12 bulan dan terealisasi sebesar 12 bulan atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 119.981.500,00 terealisasi sebesar Rp. 118.978.500,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,16 %.

4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selama sebanyak 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan atau tingkat capaian

kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 118.276.000,00 terealisasi sebesar Rp. 115.033.205,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 97,26%.

5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan jumlah gedung yang diperbaiki 1 unit dan terealisasi sebesar 1 unit atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 169.869.000,00 terealisasi sebesar Rp. 168.892.690,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,43%.

6) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan dengan target 7 dokumen tercetak 50 dokumen atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 6.172.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.172.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

7) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sebanyak 16 desa dan terealisasi sebesar 16 desa atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 33.343.000,00 terealisasi sebesar Rp. 33.343.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

8) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah pembinaan anggota linmas sebanyak 50 orang linmas dan terealisasi 50

orang atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 134.554.000,00 terealisasi sebesar Rp. 134.470.554,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,9%.

9) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah desa yang dimonitor dalam kegiatan pengawasan wilayah sebanyak 16 desa dan terealisasi 16 desa atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 10.160.000,00 terealisasi sebesar Rp. 10.160.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

10) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah desa yang difasilitasi dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebanyak 16 desa dan terealisasi 16 desa atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 61.650.000,00 terealisasi sebesar Rp. 61.650.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Adapun Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya serta tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada **Tabel T-C.29** berikut:

Tabel T-C 29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Limbangan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian realisasi target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	98	100	93.29	93.29	100	0	0
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	1	100	0	0
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah	100	89,3	100	92.26	0.9226	100	0	0
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	0	0	0		0	0
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	100	100	99,16	99.16	100	0	0
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan jasa penunjang	100	100	100	97,26	97.26	100	0	0

7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	100	98,6	100	99,43	99.43	100	0	0
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100	100	100	100	100	100	0	0
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100	100	100	100	100	100	0	0
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	100	100	100	100	100	100	0	0
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	16 kali	16 kali	100	100	100	100	0	0
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	100	100	99,94	99.94	100	0	0
7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi dengan Satpol PP	12 kali	12 kali	100	99,94	99.94	100	0	0
7	01	04	2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 kali	12 kali	100	100	100	100	0	0
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu	100	100	100	100	100	100	0	0
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	100	100	0	0

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
Semua program dan kegiatan tahun 2022 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100%) secara fisik, dan realisasi anggaran tercapai 99,4 %
2. Realisasi program/kegiatan tahun 2022 yang terealisasi sesuai dengan target kinerja 100% dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah.

No	Program/ Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Persentase
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat Daerah	100	93,28	93,28
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	160 dok	160 dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan triwulanan/semi steran	160 dok	160 dok	100
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah	100	89,3	89,3
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	92,14
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pengelola keuangan	5 orang	5 orang	100
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja	100	99,16	99,16

		administrasi umum perangkat daerah			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	12	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	12	99,99
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	12	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perpu	12	12	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan BBM dan perjalanan dinas	12	12	97,95
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	97,26	97,26
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah belanja materi	500	500	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan belanja rekening listrik, air dan telpon	12	12	92,96
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan peralatan kantor	12	12	96,12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja jasa tenaga penunjang kegiatan kantor	2 orang	2 orang	99,89

e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	99,43	99,43
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang di rehab dan diperbaiki	1	1	99,43
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100	100	100
a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100	100	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen perijinan	50	50	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	100	99,9	99,9
a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	16	16	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang mengikuti kegiatan musrenbang	16	16	100

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Monitoring dan evaluasi kegiatan efektifitas pemberdayaan masyarakat desa	16	16	100
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	99,9	99,9
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12	12	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang dimonitor	16	16	100
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi	50 orang	50 orang	99,94
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah tenaga linmas dan peserta pembinaan linmas	50 orang	50 orang	99,94
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100	100	100
a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	16	16	100

	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah APBDes yang disusun	16	16	100
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa yang dibina	16	16	100

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya / terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.

- Adanya rasionalisasi anggaran dan pandemi covid-19 mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana atau capaian kinerja tidak maksimal;
- Keterbatasan SDM dengan volume kegiatan yang kurang seimbang mempengaruhi hasil kinerja
- Keterbatasan fasilitas dan fasilitasi dari dinas terkait sehingga kegiatan dilaksanakan dengan memaksimalkan SDM yang tersedia untuk dapat mencapai hasil yang maksimal
- Adanya regulasi kebijakan yang berubah-ubah dalam waktu yang singkat sehingga pelaksanaan program dan kegiatan mengalami perubahan yang terjadi dengan memakan waktu yang lama.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD.

Target capaian program Renstra tahun 2021-2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (renja) sehubungan dengan perkembangan kebutuhan baik dari segi anggaran maupun kegiatan di wilayah.

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut adalah;

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada prioritas kegiatan sesuai visi misi daerah dan memaksimalkan anggaran yang tersedia.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Limbangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Limbangan, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Limbangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Kendal;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Limbangan selama kurun waktu tahun 2022 cukup baik. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Limbangan yang dapat terealisasi sebesar 99,4% dari target yang telah ditentukan.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Limbangan dapat dilihat dari **Tabel T-C.30** berikut.

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah			100	100	100	100	98	93.29	100	100	
2	Prosentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Prosentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah			100	100	100	100	89,3	92.26	100	100	
4	Prosentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100	100	100	100	100	0	100	100	
5	Prosentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah			100	100	100	100	100	99,16	100	100	
6	Prosentase pemenuhan jasa penunjang			100	100	100	100	100	97,26	100	100	
7	Prosentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah			100	100	100	100	98,6	99,43	100	100	
8	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan			100	100	100	100	100	100	100	100	

9	Prosentase kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan			100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD			100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa			16 kali	16 kali	16 kali	16 kali	16 kali	100	16 kali	16 kali	
12	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani			100	100	100	100	100	99,94	100	100	
13	Jumlah koordinasi dengan Satpol PP			12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	99,94	12 kali	12 kali	
14	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum			12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100	12 kali	12 kali	
15	Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	
16	Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa			16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang ada di Kecamatan Limbangan dalam melaksanakan tupoksinya adalah belum optimalnya pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi lintas sektor di setiap seksi yang disebabkan oleh keterbatasan SDM dengan beban kerja yang banyak.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Limbangan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

1}. Peraturan Desa

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum dan esensi yang diatur.

Upaya-upaya yang telah dilakukan :

- Memberikan Sosialisasi kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Sosialisasi Produk Hukum dengan sasaran Perangkat Desa dan Lembaga Desa;
- Pembinaan Anggota BPD selaku Badan Pengawas Desa yang membantu mengawasi jalannya pemerintahan desa.

2}. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)

Redaksional penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD, mekanisme kerja Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang menunjang pelaporan ADD dan DD serta Landasan Hukum yang mendasari penyusunan laporan tersebut untuk seluruh Desa banyak yang belum dioperasionalkan secara

optimal. Upaya yang telah dilakukan mengenai Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD dengan **Aplikasi Silakus**

3}. *Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Perangkat Desa*

Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana TIK yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien;

Upaya yang telah dilakukan :

- Mengadakan pembinaan peningkatan kapasitas SDM perangkat desa;
- Pembinaan administrasi desa dan aset desa;
- Peningkatan kinerja pemerintahan desa;
- Peningkatan sarana prasarana pendukung kinerja pemerintahan desa;
- Inovasi dibidang Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa.

4). *Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022*

- Target PBB Tahun 2022 Kecamatan Limbangan sebesar Rp. 1.332.485.869,00, terealisasi sebesar Rp. 1.229.524.595,00, dengan capaian kinerja 92,27%. Dari 16 desa yang sudah lunas 100% sebanyak 9 desa.
- Sebagai upaya peningkatan pembayaran PBB dilaksanakan sosialisasi dan monitoring perkembangan pembayaran pajak ke desa-desa oleh Tim intensifikasi PBB
- Selalu memantau perkembangan realisasi PBB melalui sistem.

5). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*

- Penyusunan APBDes sering tidak tepat waktu;
- Adanya perubahan regulasi kebijakan yang menghambat penyusunan APBDes
- Keterbatasan SDM Tim Penyusun APBDes
- Budaya cypaste

Upaya yang telah dilakukan :

- Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan APBDes bersama Tim Pendamping Desa dan Kecamatan;
- Mengevaluasi lebih dini konsep APBDes;
- Pendampingan ke desa-desa;
- Melaksanakan Rakor Tingkat Kecamatan dengan mengundang Tim Penyusun APBDes;
- Memaksimalkan sistem yang sudah ada untuk penyusunan APBDes tepat waktu;
- Melibatkan semua unsur yang terlibat dan berkompeten dalam penyusunan APBDes.

b. Bidang Pelayanan Publik

- Keterbatasan SDM;
- Masyarakat belum memahami sepenuhnya dengan sistem pelayanan publik berbasis IT;

Upaya yang telah dilakukan :

- Mengusulkan tambahan SDM;
- Memberikan pembekalan serta peningkatan kemampuan SDM staf yang membidangi pelayanan publik, baik melalui pelatihan formal maupun dalam koordinasi internal kecamatan dengan cara mendorong peningkatan kerjasama antar staf dan para kasi;
- Merencanakan kegiatan penataan organisasi dengan maksud untuk peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi

c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Penyusunan RKPDDes belum optimal
- Tim evaluasi yang dibentuk belum berjalan dengan optimal
- Belum tersosialisasikannya secara optimal pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis evaluasi RAPB-Des dan LPP-Des

- Perlu dibangun sarana integritas pelaporan administrasi desa sinergis dengan kecamatan secara online, menuju desa mandiri dan maju;
- Pemerintahan Desa belum memfasilitasi untuk menampung kegiatan UMKM sebagai wadah bagi peningkatan ekonomi rakyat, sementara masih berjalan individual;
- Terkait dengan peningkatan destinasi wisata, untuk infrastruktur perlu ditingkatkan sebagai akses jalan masuk ke lokasi wisata

Upaya yang telah dilakukan:

- Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan *stake holder* atau dinas terkait;
- Memantau perkembangan program kerja yang turun sehingga dapat berjalan maksimal dan berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna;
- Mengadakan pertemuan-pertemuan informal dengan tokoh masyarakat baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa/kelurahan;
- Perlu dibangun sarana integritas pelaporan administrasi desa sinergis dengan kecamatan secara online, menuju desa mandiri dan maju;
- Melakukan koordinasi dan terobosan sebagai upaya peningkatan destinasi wisata;
- Inovasi Digitalisasi Desa Wisata.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para

generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah, serta masih banyak desa yang belum terbentuk kepengurusan Karang Taruna Desa yang aktif.

Upaya yang telah dilakukan :

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target keluarga sehat dan bebas stunting;
- 3) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuhkan kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

e. Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum

- 1) Keterbatasan sarana prasarana dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Minimnya kesadaran hukum (hak dan kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha dalam hal ini pelayanan perijinan.
- 3) Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek;
- 4) Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

Upaya yang telah dilakukan :

- 1) Melakukan koordinasi dengan forkompincam dalam rangka peningkatan ketertiban masyarakat dengan keterbatasan sarpras
- 2) Mengadakan sosialisasi dan persuasif dengan PKL agar tertib, tidak mengganggu keamanan dan ketertiban sepanjang jalan protokol dan dapatnya berpindah lokasi berjualan;
- 3) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha dengan cara melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan *stakeholder* terkait.
- 4) Mengusulkan pengadaan sarana prasarana pendukung komunikasi antara pemerintahan desa dan kecamatan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Pada hasil Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 ada beberapa hal yang disesuaikan dengan RKPD ada pula yang mengalami perubahan didalam Hasil Analisis Kebutuhan dan beberapa program dan kegiatan yang mengalami penambahan anggaran serta pengurangan anggaran. Di samping itu, terdapat penambahan kegiatan pada salah satu program karena adanya penambahan kebutuhan.

Berikut ini penjabaran catatan analisis pada hasil Review RKPD Kecamatan Limbangan :

- 1) Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian kinerja tercapai 93,28% disebabkan adanya rasionalisasi anggaran dan ada beberapa kegiatan yang capaian anggarannya tidak mencapai 100% sehingga ada sisa anggaran yang dikembalikan ke kasda;
- 2) Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik capaian kinerja tercapai 100%.

- 3) Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan capaian kinerja mencapai 100%. Secara fisik kegiatan tercapai 100% dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia dan SDM yang ada.
- 4) Pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum capaian kinerja mencapai 99,9%. Ada beberapa permasalahan dalam kegiatan tersebut diantaranya belum adanya sarana komunikasi sebagai penghubung informasi antara pemerintahan desa dan kecamatan, sehingga informasi yang diterima kadang mengalami keterlambatan, penanganan dan pengawasan wilayah juga membutuhkan waktu sehubungan medan yang sulit dijangkau.
- 5) Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa capaian kinerja mencapai 100%. Adanya rasionalisasi anggaran mengakibatkan kegiatan di seksi pemerintahan desa tidak tercapai maksimal, sasaran kegiatan tidak tercapai 100%

Selanjutnya, uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel T-C.31** berikut ini:

Tabel T - C. 31
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kec. Limbangan	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	2.715.269.599	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kec. Limbangan	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	2.715.269.599	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100	6.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100	6.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah	100	2.394.682.599	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah	100	2.394.682.599	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	147.208.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	147.208.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase pemenuhan jasa penunjang	100	151.130.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase pemenuhan jasa penunjang	100	151.130.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	110.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	110.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	100	7.236.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	100	7.236.000	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Limbangan	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100	5.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Limbangan	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100	5.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Limbangan	Prosentase kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100	1.100.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Limbangan	Prosentase kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100	1.100.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Limbangan	Jumlah dokumen peayanna umum yang dikeluarkan	100	3.900.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Limbangan	Jumlah dokumen peayanna umum yang dikeluarkan	100	3.900.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	Kec. Limbangan	Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPd	100	12.249.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	Kec. Limbangan	Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPd	100	12.249.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Limbangan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100	15.249.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Limbangan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100	15.249.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Limbangan	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	102.300.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Limbangan	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	102.300.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Limbangan	Jumlah koordinasi dengan Satpol PP	100	97.600.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Limbangan	Jumlah koordinasi dengan Satpol PP	100	97.600.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Limbangan	Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu	100	19.767.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Limbangan	Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu	100	19.767.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Limbangan	Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa	100	3.640.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Limbangan	Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa	100	3.640.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kendal membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal Bottom Up yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Kabupaten Kendal. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan Top Down dari kunjungan kerja Bupati dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kendal yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem E-Planning yang diajukan ke Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Kecamatan Limbangan berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Usulan masyarakat yang masuk kedalam RKPD dan Renja Kecamatan Limbangan adalah usulan untuk. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupate Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Limbangan

No.	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Limbangan	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Limbangan	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun	100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah	100	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Limbangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Limbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian	100	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Limbangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase capaian kinerja adm umum Perangkat Daerah	100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Limbangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Limbangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Limbangan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Limbangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Limbangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Limbangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Limbangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Limbangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Limbangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Limbangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Limbangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Limbangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Limbangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Limbangan	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	100	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Limbangan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Limbangan	jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Limbangan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Limbangan	jumlah koordinas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Limbangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Limbangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Limbangan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Limbangan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Limbangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Limbangan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam kegiatan pembinaan pengawasan pemerintahan desa	100	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Limbangan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Limbangan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Limbangan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Limbangan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	100	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Limbangan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec. Limbangan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Limbangan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	100	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan Nasional adalah pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana Nasional pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka dokumen perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2024 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kendal Tahun 2024.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Limbangan Tahun 2024 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun propinsi.

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun 2024, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan PUG pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengaursutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran, pada tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah.

Pada tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Kecamatan Limbangan, dan Rencana Kerja Kecamatan Limbangan .

Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di bidang pembangunan. Pengarusutamaan gender merupakan proses memasukkan analisis gender ke dalam program dan kegiatan dari instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

Fungsi Kecamatan Limbangan sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Kendal sesuai yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dimana pada tahun 2024 mendatang kecamatan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di bidang sebagaimana rencana yang sudah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan rencana kerja PD tahun 2024 adalah untuk melaksanakan sebagian wewenang tugas Kepala Daerah yang dilimpahkan kepada kecamatan, rencana kerja tersebut didukung dengan program dan kegiatan di bidang pelayanan administrasi perkantoran, bidang pelayanan publik, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta di bidang pemerintahan desa.

Sedangkan sasaran program Kecamatan Limbangan tahun 2024 secara umum adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan.

3.3 Program dan Kegiatan

Pelaksanaan kinerja Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal 2024 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung (belanja pegawai) dan belanja langsung (Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal), dalam Rencana Kerja kecamatan Limbangan tahun 2024 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Belanja Langsung dan Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang & Jasa dan Belanja Modal dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.551.305.283,- yang terbagi ke dalam beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - a.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - a.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - b) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - b.1. Penyediaan Komponen Instalasi;
 - b.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - b.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - b.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - b.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - c) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - c.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - c.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

- c.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; dan
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a.1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 - a.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Mustawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
- 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a.1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
 - a.2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - a.3. Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Limbangan Tahun 2024 dan Prakiraan maju Tahun 2025 akan disajikan pada tabel T-C. 33 sebagai berikut :

Tabel T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Jawa
Tengah Kabupaten Kendal
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Limbangan

Lembar _____ dari _____

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target	Kebutuhan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01				KECAMATAN				2.551.305.283				3.409.976.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		Kec. Limbangan		2.432.435.283				3.048.976.000
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	Kec. Limbangan	4 dokumen	0				20.000.000
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun		4 Dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Dokumen	10.000.000
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun		25 Laporan	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25 Laporan	10.000.000

7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah			2.221.452.283	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.400.476.000
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		19 orang / bulan	2.159.602.283	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19 orang / bulan	2.350.000.000
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	61.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	50.476.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian			0				12.000.000
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Limbangan	21 paket	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase capaian kinerja adm umum Perangkat Daerah			97.333.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			243.500.000
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Limbangan	10 paket	3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 paket	3.500.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Limbangan	2 paket	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 paket	40.000.000
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Limbangan	4 Paket	3.396.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Paket	23.000.000
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Limbangan	12 Paket	23.630.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Paket	55.000.000

7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Limbangan	12 Paket	18.542.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Paket	50.000.000
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Limbangan	12 Dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	2.000.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Limbangan	250 laporan	48.765.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250 laporan	70.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Limbangan	1 unit	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	200.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			113.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			143.000.000
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Limbangan	500 laporan	3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		500 laporan	5.000.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Limbangan	12 laporan	33.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 laporan	40.000.000

7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Limbangan	12 laporan	15.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 laporan	30.000.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Limbangan	12 laporan	62.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 laporan	68.000.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah			0				30.000.000
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Limbangan	1 unit	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 unit	30.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								145.000.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah koordinasi yang dilaksanakan			100.000.000				125.000.000
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Limbangan	12 laporan	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 laporan	125.000.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan			0				20.000.000
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Limbangan	200 dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200 dokumen	20.000.000

					Pelayanan Perizinan Non Usaha								
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			2.250.000					85.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa			2.250.000				85.000.000
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Limbangan	16 Lembaga	2.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 Lembaga	20.000.000
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Limbangan	16 Laporan	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 laporan	65.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				0				60.000.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum			0				
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Limbangan	16 laporan	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 laporan	30.000.000
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan	Kec. Limbangan	16 laporan	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 laporan	30.000.000

						dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam kegiatan pembinaan pengawasan pemerintahan desa			16.620.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			71.000.000
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Limbangan	16 dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 dokumen	15.000.000
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Limbangan	16 dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 dokumen	15.000.000
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Limbangan	16 dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 dokumen	15.000.000
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Limbangan	16 dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 dokumen	5.000.000
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Limbangan	1 dokumen	10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dokumen	6.000.000
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pangkatan dan	Kec. Limbangan	16 dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 dokumen	5.000.000

						Pemberhentian Perangkat Desa							
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Limbangan	16 laporan	6.620.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 laporan	10.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan SKPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan catatan untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja juga merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ante), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator knerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor public memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan public yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Kecamatan Limbangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Limbangan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks kepuasan masyarakat	Skor
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Nilai SAKIP Kecamatan	Skor

Kelompok Sasaran adalah sekumpulan sasaran yang mempunyai tujuan interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan program dalam kurun waktu yang ditentukan.

Indikator Sasaran adalah alat ukur spesifik menggambarkan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Prov, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Limbangan Tahun 2024 sebagaimana tersebut dibawah :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kab. Kendal

Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN LIMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN LIMBANGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					KECAMATAN LIMBANGAN								2.715.269.599				3.454.658.599	
7					UNSUR KEWILAYAHAN								2.715.269.599				3.454.658.599	
7	01				KECAMATAN								2.715.269.599				3.454.658.599	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.575.953.599				3.093.658.599	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								6.000.000				20.000.000	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan	100 % 100.00 %	4 Dokumen	4 Dokumen	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.000.000
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	25 Laporan	4 Dokumen	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Laporan	10.000.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.394.682.599					2.445.158.599
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	19 Orang/bulan	26 Laporan	2.094.682.599	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2.394.682.599
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	12 Dokumen	26 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	50.476.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								0					12.000.000

7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pakaian Dinas harian dan atribunya	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100.00 % 100 %	21 Paket	19 Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	12.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								147.208.000					243.500.000
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan dokumen administrasi umum	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	10 Paket	6 laporan	6.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	3.500.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan dokumen administrasi umum	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	2 Paket	6 laporan	18.740.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	40.000.000
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah laporan dokumen administrasi umum	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	4 Paket	6 laporan	3.046.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	23.000.000
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan dokumen administrasi umum	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	12 Paket	6 laporan	18.220.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	55.000.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah laporan dokumen administrasi umum	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	12 Paket	6 laporan	18.690.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	50.000.000
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah laporan dokumen administrasi umum	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	12 Dokumen	6 laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.000.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan dokumen administrasi umum	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	250 Laporan	6 laporan	125.009.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	70.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								110.000.000					200.000.000
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang milik daerah Penunjang urusan yang tersedia	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	1 Unit	0 0	110.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								151.130.000					143.000.000
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	500 Laporan	12 Bulan	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	5.000.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	12 Laporan	12 Bulan	43.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	12 Laporan	12 Bulan	56.730.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	12 Laporan	12 Bulan	63.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	68.000.000
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								7.236.000				30.000.000
7	01	01	2.09	0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100.00 % 100 %	1 Unit	1 unit	7.236.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								5.000.000				145.000.000
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								1.100.000				125.000.000
7	01	02	2.01	0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
						Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan Jumlah dokumen pelayanan yang tercetak	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	64 kali 100 % 200 dokumen	12 Laporan	0 kali 12 kali	1.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	125.000.000
7	01	02	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								3.900.000				20.000.000

7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha													
						Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan Jumlah dokumen pelayanan yang tercetak Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jumlah dokumen pelayanan umum yang dikeluarkan Jumlah dokumen pelayanan yang dikeluarkan	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	64 kali 200 dokumen 100 %	0 Dokumen	200 Dokumen 200 dok	3.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanak an	0 Dokumen	20.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								15.249.000					85.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								15.249.000					85.000.000
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
						Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah laporan kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	50 %	16 Lembaga Kemasyarak atan	16 desa	460.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipas i dalam Forum Musyawarah Perencanaa n Pembangun an di Desa	16 Lembaga Kemasyar akatan	20.000.000
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	50 %	16 Laporan	16 desa	11.789.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	65.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								102.300.000					60.000.000

7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								97.600.000					60.000.000
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
						Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang dimonitor Jumlah laporan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	16 Laporan	16 desa 2 laporan	96.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	30.000.000
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
						Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah desa yang dimonitor Jumlah laporan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	16 Laporan	16 desa 2 laporan	5.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16 Laporan	30.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								19.767.000					71.000.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								3.640.000					71.000.000
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa													
						Persentase Penyusunan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 %	16 Dokumen	16 Desa	300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan	16 Dokumen	15.000.000

																Peraturan Kepala Desa		
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
						Persentase Penyusunan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 %	16 Dokumen	16 Desa	600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintah n Desa	16 Dokumen	15.000.000
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
						Persentase Penyusunan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 %	16 Dokumen	16 Desa	16.767.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagun aan Aset Desa	16 Dokumen	15.000.000
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa													
						Persentase Penyusunan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Dokumen	16 Desa	300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0 Dokumen	5.000.000
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													

						Persentase Penyusunan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	16 Desa	100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	6.000.000
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													
						Persentase Penyusunan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Dokumen	16 Desa	300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Rekomendas i Pengangkata n dan Pemberhenti an Perangkat Desa	0 Dokumen	5.000.000
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
						Persentase Penyusunan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 %	16 Laporan	16 Desa	1.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendamping an Desa di Wilayahnya	16 Laporan	10.000.000
TOTAL													2.715.269.599					3.454.658.599

BAB V

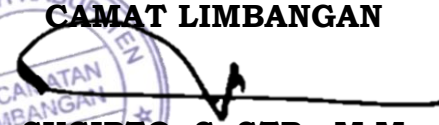
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun 2024 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal tahun 2024 ini telah diupayakan sebaik-baiknya, terukur dan akuntabel, disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun-tahun sebelumnya, isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal akan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan akan terpenuhi. Jika dalam proses selanjutnya ternyata kondisi keuangan daerah tidak dapat memenuhi pagu indikatif yang dialokasikan untuk Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dimana implikasinya Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal akan mengurangi jumlah pagu kegiatan dan merasionalisasi kembali anggaran pada setiap kegiatan yang ada. Dalam mengeliminasi dan merasioanalisis RENJA yang ada, Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal akan benar-benar menelaah dimana kegiatan-kegiatan yang dapat dieliminasi tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang paling kecil peranannya dalam pencapaian target dan sasaran dalam RENSTRA.

Keberhasilan pelaksanaan Renja tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan, serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu mohon aparat pemerintah khususnya Aparatur Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dan lembaga lainnya bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Renja ini.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal tahun 2024 dan dapat menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran pada Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.


CAMAT LIMBANGAN

SUCIPTO, S. STP., M.M
Pembina
NIP. 197807041997031002